

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KANDRI KOTA SEMARANG

Oleh :

Aulia Rizki Nabila, Tri Yuniningsih

**Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan suatu program pembangunan. Desa Wisata merupakan desa yang memiliki daya tarik dan berpotensi sebagai objek pariwisata yang dilihat dari aspek potensi alam maupun budaya masyarakatnya yang bertujuan untuk pengembangan suatu desa dan meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Desa Wisata dibentuk sendiri oleh masyarakat desa tersebut, maka peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan ini sangat besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri dalam upaya pengembangan Desa Wisata Kandri, dan untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Kandri. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri dalam pengembangan Desa Wisata kandri masih berbentuk partisipasi semu atau *psudeo-participation*, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat Kandri dalam pengembangan Desa Wisata Kandri ini sudah berada pada tingkat tertinggi yaitu *citizen power*. Faktor yang mendorong yaitu pengetahuan terhadap program, jenis kelamin, kepercayaan masyarakat, dan faktor eksternal sedangkan faktor yang menghambat yaitu pekerjaan masyarakat, pendidikan, dan faktor eksternal.

Disarankan untuk dapat memperbaiki partisipasi masyarakat sehingga berbentuk partisipasi otentik dengan mengajak seluruh ikut berpartisipasi langsung dengan menjadi anggota pokja agar manfaat dapat diterima secara menyeluruh. Pada tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri yang sudah berada di tingkat *citizen power* diharapkan pemerintah bisa lebih banyak memberi informasi, tidak hanya memberi pengumuman lewat ketua RT atau RW namun memberi undangan ke setiap rumah saat akan ada pertemuan atau kegiatan agar partisipasi masyarakat lebih tinggi. Pada faktor latar belakang pendidikan yang

dapat dilakukan adalah memberikan pengarahan dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengembangan Desa Wisata Kandri, pada faktor eksternal pemerintah harus lebih berinovasi dalam mengadakan pelatihan-pelatihan agar warga tidak bosan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengembangan, Desa Wisata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari lima pulau besar, diantaranya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Dan selain itu juga terdapat beribu pulau kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta memiliki keanekaragaman bahasa, suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki banyak tempat yang berpotensi besar untuk dijadikan objek wisata menarik dan dapat mendatangkan keuntungan bagi negara. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia yang luar biasa akan dapat menarik wisatawan lokal maupun asing.

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan industri pelayanan dan jasa yang menjadi andalan Indonesia dalam rangka meningkatkan devisa negara di sektor non migas. Pada hakekatnya kekayaan alam, seni budaya, tradisi masyarakat dan keanekaragaman potensi kepariwisataan berupa berbagai fasilitas yang dimiliki daerah dapat menjadi modal dasar pengembangan dan pembangunan kepariwisataan. Perkembangan pariwisata

saat ini demikian pesat, dan merupakan fenomena global dengan melibatkan jutaan manusia baik dikalangan masyarakat maupun penggunanya.

Kandri berstatus sebagai kelurahan namun dalam pengembangan wisata disebut sebagai Desa Wisata Kandri. Desa Wisata Kandri terbentuk bermula dari keinginan yang sama antar masyarakat setempat. Masyarakat sering melakukan kumpul antar RT, antar RW, dan kumpul pengajian antar warga. Dari pertemuan tersebut warga sepakat untuk menjadikan Kelurahan Kandri sebagai kawasan desa wisata dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada dan menata tempat agar menjadi tempat wisata yang digemari wisatawan.

Desa Wisata Kandri di Kota Semarang sejak ditetapkan Keputusan Waikota Nomor 556/407 tahun 2012 Tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Sebagai Desa Wisata Kota Semarang.

Mewujudkan desa wisata perlu beberapa syarat salah satunya adalah terdapat POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). POKDARWIS dibentuk untuk menjembatani masyarakat agar dapat

memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki dalam upaya pengembangan Desa Wisata Kandri. POKDARWIS memiliki tugas untuk merangkul seluruh masyarakat agar bekerja bersama-sama membangun potensi yang dimiliki Kelurahan Kandri.

Usaha pengembangan Desa Wisata Kandri salah satunya yaitu dengan adanya partisipasi dari masyarakat Kelurahan Kandri sendiri. Menurut Sastrodipoetro (dalam Ainur Rohman, 2009:45) menyatakan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri sangat diperlukan.

Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa Wisata Kandri, tidak semua warga ikut berpartisipasi didalamnya, sebagian besar warga berusia dewasa yang berpartisipasi sedangkan remaja atau pemuda tidak terlihat berpartisipasi. Seperti kegiatan Gendong Lesung, Nyadran Kali, dan Pelatihan Desa berkaitan dengan partisipasi warga dirasa masih rendah, yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini hanyawarga usia dewasa saja hanya sedikit pemuda maupun remaja yang terlibat didalamnya. Hal

tersebut juga terlihat pada jumlah kehadiran pengurus POKDARWIS pada setiap pertemuan rutin membahas pengembangan Desa Wisata Kandri, tidak sampai 80% pengurus hadir dalam pertemuan tersebut sehingga membuat asumsi bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri ini rendah.

Dalam pengembangan Desa Wisata Kandri, masyarakat dirasa belum optimal dalam berpartisipasi khususnya pada pemberdayaan menggali potensi Desa Wisata Kandri seperti contohnya tidak semua warga ikut menjadi anggota dalam Pokja (Kelompok Kerja) yang dibentuk untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Kandri. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Kandri?

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Kandri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Kandri.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Kandri.

D. Kajian Pustaka

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano, (Pasolong, 2010:7), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola

(manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut L. Lyod G. Nigro (dalam Pasolong, 2004:8), mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi 3 cabang pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan serta hubungan di antara mereka, mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan bagian dari proses politik, sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Manajemen Publik

Hyde dan Shafritz (1997), mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata

manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Wilson (dalam Harbani Pasolong, 2007:96) meletakkan empat prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang yaitu : (1) pemerintah sebagai setting utama organisasi, (2) fungsi eksekutif sebagai fokus utama, (3) pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, (4) metode perbandingan sebagai suatu metode studi pengembangan bidang administrasi publik.

3. Partisipasi

Sastrodipoetro (Ainur Rohman, 2009:45) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Charly (Ainur Rohman, 2009:45) menyatakan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seorang atau sekelompok masyarakat di dalam situasi kelompok yang

mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan diri) menurut kemampuan swadaya yang ada, untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam pertanggungjawabannya.

Tjokroamidjojo (Ainur Rohman, 2009:46) mengartikan partisipasi sendiri sebagai keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan prasyarat-prasyarat atau elemen-elemen partisipasi.

4. Partisipasi Masyarakat

Menurut Soetrisno (1995:222) ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat yaitu:

1. Definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana atau proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Menurut definisi ini ukuran tinggi rendahnya partisipasi

rakyat dalam definisi ini pun diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah.

2. Definisi yang berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Menurut definisi ini ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain untuk mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan

mengembangkan hasil proyek itu.

Menurut Soetrisno (1995) terdapat beberapa unsur dalam partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

1. Adanya kemauan masyarakat untuk berperan secara mandiri dalam suatu kegiatan.
2. Kegiatan tersebut dilakukan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
3. Supaya mencapai tujuan kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis atau dilakukan dengan sistem manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi).

5. Konsep Pariwisata

Menurut Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menurut Mc. Intosh dan Goelder (Wardiyanto, 2011) pariwisata adalah ilmu atau seni dan bisnis yang dapat menarik dan

menghimpun pengunjung, termasuk di dalamnya berbagai akomodasi dan catering yang dibutuhkan dan diminati oleh pengunjung.

6. Pengembangan Pariwisata

Munasef (1995: 1) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan wisatawan.

Menurut Pearce (1981:12) Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai “usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat”.

7. Desa Wisata

Menurut Mulyawan (2008), Desa wisata adalah desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan.

Menurut (Nuryanti, 1993:2-3). Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang

disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Semarang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua POKDARWIS Pandanaran Desa Wisata Kandri, lalu kepada informan yang di tunjuk. Teknik penentuan informan menggunakan Snowball Sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara serta pengamatan langsung dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang dimiliki Desa Wisata Kandri Kota Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk analisis data dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Partisipasi

Terdapat 2 bentuk partisipasi menurut Midgley, yaitu *Authentic Participation* atau Partisipasi Otentik, dan *Pseudo-Participation* atau Partisipasi Semu. Terdapat 3 kriteria dalam partisipasi otentik yaitu sumbangsih warga terhadap program, keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, dan penerimaan manfaat program secara merata. Apabila salah satu dari 3 kriteria tersebut tidak dapat terpenuhi, maka bentuk partisipasinya adalah *Pseudo-Participation* atau partisipasi semu.

1. Sumbangsih atau bantuan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.

Sumbangsih atau bantuan yang diberikan oleh masyarakat bisa berupa bantuan materi atau barang, tenaga, waktu, ide, saran, kritik dan masukan lainnya yang dapat terus mendukung pengembangan Desa Wisata Kandri.

Sumbangsih masyarakat Kelurahan Kandri terhadap pengembangan Desa Wisata Kandri yaitu pada saat kegiatan-kegiatan yang berlangsung seperti Nyadran

Kali maupun Sesaji Rewanda, membantu dalam bentuk waktu dan tenaga pada saat memandu wisatawan yang datang ke Desa Wisata Kandri, serta membantu ide dan saran terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ditawarkan dalam paket wisata Desa Wisata Kandri maupun terkait dengan masa depan Desa Wisata Kandri merupakan kriteria bahwa sumbangsih dari masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri sudah terpenuhi.

2. Pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Kandri

Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan merupakan hal yang penting agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Peran dan bantuan masyarakat dalam proses ini diperlukan agar keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Pengambilan keputusan merupakan hal yang penting agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar dengan tujuan dan sasaran.

Pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Kandri

ini melibatkan peran masyarakat dan melalui rembug warga, pertemuan, musyawarah mufakat dan musrembang. Dari hasil pemikiran-pemikiran untuk mengambil keputusan maka akan didapati keputusan yang paling serius dan mendesak, lalu dijadikan prioritas untuk diselesaikan. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran yang sama besar dengan pengurus POKDARWIS, karena dari pemikiran masyarakat inilah yang nantinya akan menghasilkan berbagai saran dan masukan untuk menjadi sebuah keputusan. Maka kriteria keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang sudah terpenuhi.

3. Penerimaan manfaat secara merata

Desa Wisata Kandri telah menjadi Desa Wisata yang lebih berkembang dibandingkan dengan Desa Wisata lainnya di Kota Semarang, masyarakat sudah merasakan manfaat dari adanya Desa Wisata Kandri ini. Banyak manfaat yang telah dirasakan oleh warga seperti meningkatnya

kesejahteraan masyarakat melalui kepariwisataan dengan berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Dari seluruh warga Kelurahan Kandri hanya sebagian saja yang sudah merasakan manfaat secara nyata dan perekonomian pun sudah meningkat, warga tersebut yang telah berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Kandri dan membentuk kelompok dan usaha di bidang masing-masing seperti kuliner, sablon, kerajinan, dan sebagainya. Sedangkan warga yang tidak ikut berpartisipasi langsung dan tidak menjadi anggota kelompok swadaya masyarakat, maupun tidak memiliki usaha di bidang kepariwisataan memang sampai saat ini belum merasakan manfaat yang ditimbulkan dari pengembangan Desa Wisata Kandri ini. Dengan demikian indikator penerimaan manfaat dari pengembangan Desa Wisata Kandri secara merata pada masyarakat di Kelurahan Kandri belum terpenuhi.

B. Tingkat Partisipasi

Dalam penelitian ini menggunakan teori tingkat partisipasi dari Arnstein. Menurut Arnstein terdapat 3 tingkatan

partisipasi yaitu *Citizen Power*, *Tokenism*, dan *Non-participation*. Dalam penelitian ini 2 tingkat yang akan diteliti yaitu tingkat *Citizen Power* dan *Tokenism*.

1. *Citizen Power*

Dalam *citizen power* terdapat tiga sub tingkatan yaitu yang terendah adalah *partnership*, *delegated power* dan *citizen control*. Tingkatan *partnership* berarti adanya kemitraan antara petugas yang berwenang dengan masyarakat dalam program pembangunan. Lalu tingkatan *delegated power* berarti pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya dalam suatu program pembangunan. Terakhir adalah tingkatan *citizen control* berarti masyarakat diberikan wewenang secara mandiri untuk mengendalikan suatu program mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasinya.

Tingkat terendah dari *citizen power* yaitu tangga *partnership*, bisa dikatakan bahwa derajat partisipasi masyarakat sudah sampai pada tingkat *partnership* ini. POKDARWIS dan pemerintah sudah menjalin kemitraan dengan

masyarakat. POKDARWIS Desa Wisata dan masyarakat menjalin kemitraan dengan membentuk asosiasi atau pokja (kelompok kerja) dan membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk mengajak masyarakat yang ingin mengembangkan diri dan berinovasi khususnya untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Kandri.

Sub tingkat kedua dari tingkat *Citizen Power* yaitu *Delegated Power*. Dalam sub tingkat *delegated power* ini bisa dikatakan bahwa derajat partisipasi masyarakat Kandri juga sudah sampai pada tingkat ini. Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada masyarakat Kandri untuk mengurus keperluannya dalam pengembangan Desa Wisata Kandri, karena Desa Wisata ini terbentuk oleh masyarakatnya sendiri maka masyarakat sendiri juga lah yang tahu apa saja yang diperlukan dalam Desa Wisata ini. Pemerintah hanya melakukan pembinaan dan mengeluarkan kebijakan.

Dalam sub tingkat *citizen control* ini maksudnya masyarakat mengendalikan kebijakan publik

mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasinya bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri dalam pengembangan Desa Wisata Kandri sudah berada pada tingkat *citizen control* ini. Dalam Desa Wisata ini pengendali kebijakan yaitu POKDARWIS, namun POKDARWIS ini juga melibatkan masyarakat diluar pengurus untuk menjadi pengendali juga dalam kebijakan-kebijakan Desa Wisata Kandri.

2. *Tokenism*

Tokenisme merupakan tingkat dimana terjadinya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Tokenime dibagi lagi menjadi tiga tingkatan. Mulai dari tingkat *information*, *consultation* dan *placation*. Pertama yang merupakan tingkatan terendah dalam tingkat *tokenism* adalah *information* yang artinya terjadi komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi yang terjadi diharapkan mampu membantu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pengembangan Desa Wisata Kandri.

Komunikasi satu arah sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti memberi pengumuman saat akan dilaksanakan pameran, pelatihan atau sosialisasi untuk warga Kandri, pengumuman tersebut disampaikan saat ada pertemuan rutin yang dilaksanakan di setiap RT atau RW di Kelurahan. Tidak hanya informasi lewat pengumuman, pemerintah juga telah membuat leaflet tentang Desa Wisata agar masyarakat lebih siap lagi menjadi masyarakat yang partisipatif dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.

Selanjutnya tingkatan kedua dalam tingkat *tokenism* adalah *consultation* yaitu adanya komunikasi dua arah, berupa pertemuan-pertemuan dengan masyarakat untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertemuan ini yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap kegiatan yang mendukung pengembangan Desa Wisata Kandri. Desa Wisata Kandri Pertemuan satu bulan sekali dilaksanakan untuk pertemuan seluruh pengurus POKDARWIS, sedangkan pertemuan tiga bulan sekali dihadiri oleh pengurus POKDARWIS, RT,

RW, Lurah, Camat, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, serta warga masyarakat Kelurahan Kandri untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan juga membahas evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Tidak hanya pertemuan rutin saja, di Desa Wisata Kandri pernah dilaksanakan FGD (*Forum Group Discussion*) membahas perkembangan Desa Wisata Kandri dan membahas apa yang akan dilakukan mendatang.

Tangga tertinggi pada tingkat *tokenism* adalah *placation*. Yang dimaksud dengan *placation* disini adalah melibatkan warga untuk menjadi anggota komite dalam program namun hak memutuskan tetap berada di tangan pemegang kekuasaan. Di Desa Wisata Kandri ini telah dibentuk komite-komite kecil untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Kandri. Komite-komite yang telah dibentuk ini adalah pokja (kelompok kerja) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Pokja-pokja dan KSM yang telah terbentuk memiliki bidangnya masing-masing, dimulai dari bidang

kuliner, batik, sablon, kerajinan tangan, pemandu wisata dan transportasi. Komite-komite kecil atau pokja yang telah dibentuk diberi kewenangan dalam proses pengambilan keputusan. Pokja-pokja selalu berperan dalam setiap pengambilan keputusan karena pokja tersebut yang tahu apa masalah yang terjadi dan mengerti apa yang harus diprioritaskan.

C. Faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang.

Pada pengembangan Desa Wisata Kandri telah menemui beberapa kendala yang menjadi faktor partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Ada enam faktor yang mendorong maupun menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program yaitu pengetahuan masyarakat terhadap program, tingkat pendidikan masyarakat, jenis kelamin, kepercayaan terhadap budaya tertentu dan faktor eksternal yang berasal dari stakeholder.

A. Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri adalah :

1. Faktor Pekerjaan Masyarakat

Latar belakang pekerjaan masyarakat menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Walaupun mungkin saja memang ada beberapa yang karena latar belakang pekerjaan dan berbagai kesibukan jadi tidak memiliki waktu luang untuk berpartisipasi pada pengembangan Desa Wisata Kandri, dan pekerjaan masyarakat menjadi faktor penghambat.

2. Faktor Pendidikan

Melihat seberapa jauh latar belakang pendidikan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri, namun pada kenyataannya terlihat pada latar belakang pendidikan warga Kandri terbanyak yaitu lulusan SD. Dapat disimpulkan, bahwa tingkat pendidikan menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.

3. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*Stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap pengembangan Desa Wisata Kandri. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau dalam hal ini pihak Pengurus POKDARWIS di Desa Wisata Kandri membawa pengaruh bagi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Petaruh kunci yang dimaksud disini juga bisa dimaksudkan sampai kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang memegang peran penting dalam pengembangan Desa Wisata Kandri seperti pengawas dan pembina. Dan peran media masa dalam mempromosikan Desa Wisata Kandri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet dengan membuat blog maupun web dan iklan.

faktor eksternal yang menjadi penghambat yaitu dari Disbudpar ialah pelatihan yang monoton sehingga warga bosan mengikuti pelatihan tersebut, dan dari POKDARWIS dalam pengurus masih ada rasa individualisme yang tinggi dan masih memikirkan kepentingan

pribadi, dan kurang mengayomi dalam mengajak warga untuk berpartisipasi, dan secara administratif belum berjalan dengan baik.

B. Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat adalah :

1. Pengetahuan terhadap program

Pemahaman masyarakat bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat itu sendiri. Kita akan melihat adanya kecenderungan masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Kandri dari seberapa jauh pengetahuan masyarakat mengenai Desa Wisata.

Hampir seluruh masyarakat Kelurahan Kandri pada umumnya sudah mengetahui Desa Wisata dan paham bahwa Kandri sudah diangkat menjadi Desa Wisata di Kota Semarang. Pemahaman masyarakat akan pengembangan Desa Wisata Kandri pun dirasa sudah sangat baik.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor dalam partisipasi masyarakat. Di wilayah Kandri sendiri jumlah warga berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah warga yang berjenis kelamin perempuan. Disini

kita akan melihat seberapa jauh jenis kelamin ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Ada sektor yang memang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja seperti pemandu river tubing, pemandu river tubing semua dilakukan oleh laki-laki karena mengingat fisik laki-laki lebih kuat dan berani dibandingkan dengan perempuan, tetapi tetap banyak juga perempuan yang berpartisipasi tapi di sektor lain seperti kuliner atau batik. Faktor jenis kelamin menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri, karena perempuan dan laki-laki memiliki porsinya masing-masing dalam berpartisipasi.

3. Kepercayaan terhadap budaya tertentu

Kepercayaan terhadap budaya tertentu merupakan faktor yang mungkin mempengaruhi karena masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan partisipasi masyarakat. Di Desa Wisata Kandri sendiri memang sangat mengunggulkan budaya, dalam salah satu kegiatannya yaitu “Nyadran Kali” untuk menghormati para leluhur.

Kepercayaan atau budaya tertentu yang berkembang di masyarakat memang beragam, diantaranya yaitu adanya keyakinan yang bertentangan dengan budaya-budaya terdahulu yang menyangkut dengan ritual tertentu. Desa Wisata Kandri tidak hanya menawarkan wisata alam dan edukasi, namun juga terdapat wisata budaya yang bisa dibilang kental, dahulu memang ada beberapa masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan Desa Wisata Kandri apalagi kegiatan yang berbaur budaya karena bertolak belakang dengan kepercayaan, namun seiring berjalannya waktu masyarakat yang menentang bisa mengerti bahwa ini merupakan kebutuhan kepariwisataan dengan menjual budaya-budaya yang ada dan kegiatan kebudayaan tersebut tetap berjalan. Faktor kepercayaan terhadap budaya tertentu menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.

4. Faktor Eksternal

Dalam pengembangan Desa Wisata Kandri faktor pendorong partisipasi masyarakat yang paling

signifikan adalah dari POKDARWIS dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh Disbudpar, Pokdarwis telah memberi kesempatan masyarakat untuk menjadi anggota pokja, Disbudpar telah memberikan kebijakan, dan memberi pembinaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri dalam pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang adalah *pseudo-participation* atau partisipasi semu, hal ini didasarkan pada 3 kriteria *Authentic Participation* yaitu sumbangsih terhadap usaha pengembangan Desa Wisata Kandri, penerimaan manfaat secara merata, dan pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Kandri terdapat 1 kriteria yang tidak dapat terpenuhi yaitu penerimaan manfaat kepada masyarakat secara merata karena tidak semua warga Kelurahan Kandri ikut partisipasi langsung dengan membuka peluang usaha maupun menjadi anggota kelompok kerja.

2. Tingkat Partisipasi

Tingkatan partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri dalam pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang berada pada tingkatan paling tinggi yaitu *Citizen Power*. Pada tingkatan partisipasi masyarakat, dalam tingkatan *tokenism* sudah ada komunikasi dua arah antara pihak POKDARWIS dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan masyarakat Kelurahan Kandri berupa pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh POKDARWIS yang melibatkan RT, RW, Lurah, Camat hingga level kedinasan. Juga sudah dibentuk komite-komite kecil yang mendukung pengembangan Desa Wisata Kandri berbentuk kelompok kerja (pokja), pokja tersebut membidangi setiap sektor pendukung pariwisata yaitu kuliner, kesenian, kerajinan, dan pemandu wisata. Tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri sudah berada pada tingkat tertinggi yaitu *citizen power*, dikarenakan adanya kemitraan antara petugas yang berwenang dengan masyarakat dalam bentuk pokja seperti komite-komite kecil tadi, pemerintah juga telah memberikan kewenangan terhadap masyarakat untuk mengurus sendiri keperluan dan kebutuhan dalam

upaya pengembangan Desa Wisata Kandri, serta masyarakat juga mengendalikan kebijakan-kebijakan yang ada di Desa Wisata Kandri mulai dari perumusan hingga evaluasi dalam pengembangan Desa Wisata kandri.

3. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri

- Faktor pendorong : Pengetahuan masyarakat terhadap Program, Jenis Kelamin, dan Faktor Eksternal (Disbudpar : Mengeluarkan kebijakan, melaksanakan pelatihan, melaksanakan sosialisasi, melakukan pembinaan. POKDARWIS : memberi kesempatan masyarakat ikut Pokja, menjadi jembatan untuk masyarakat untuk memberdayakan potensi yang ada. Media Masa : membantu dalam mempromosikan Desa Wisata Kandri)
- Faktor penghambat : Pekerjaan masyarakat, pendidikan, dan Faktor Eksternal (Disbudpar : kurang inovatif dalam melaksanakan pelatihan sehingga masyarakat bosan dan enggan

berpartisipasi. POKDARWIS : pengurus memiliki sifat individualis dan egoisme yang masih tinggi dan mementingkan kepentingan pribadi, kurang mengayomi dalam mengajak partisipasi, belum ada pengakderan pengurus yang lebih muda dan lebih berkompeten. Secara administratif data mengenai jumlah wisatawan belum didata secara valid, dan AD/ART belum berjalan sesuai dengan semestinya.)

B. Saran

1. Bentuk Partisipasi

Dibutuhkan intensitas untuk mengajak warga Kelurahan Kandri untuk berpartisipasi dan ikut menjadi anggota-anggota KSM atau pokja, serta memberi sosialisasi kewirausahaan agar masyarakat dapat terjun langsung dalam Desa Wisata sehingga dapat merasakan manfaat, dan manfaat akan lebih merata.

2. Tingkat Partisipasi

informasi lebih dibuat menarik, pengumuman-pengumuman mengenai pelatihan yang akan dilaksanakan tidak hanya sebatas disampaikan melalui RT atau RW,

namun bisa pengumuman secara tertulis mengundang satu persatu KK dengan undangan dan dengan menggunakan pamflet yang lebih tersebar di Kelurahan Kandri agar masyarakat lebih banyak mengetahui info kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.

3. Faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri

Bagi POKDARWIS yaitu lebih menyadarkan anggota pengurus yang memiliki egoisme yang tinggi, lebih mengayomi masyarakat dalam menggalang partisipasi, serta bisa merekrut lagi pengurus POKDARWIS dan lebih selektif dalam memilih pengurus nya dengan mencari yang benar-benar tulus dan peduli pada Desa Wisata Kandri. Sedangkan untuk DISBUDPAR lebih banyak ide-ide segar dan berinovasi lagi dalam membuat pelatihan, serta tidak memukul rata setiap kegiatan

pelatihan pada Desa Wisata di Semarang karena setiap Desa Wisata perkembangannya beda dan harus sesuai dengan kebutuhan Desa Wisata tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Demartoto, Argyo. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta : UNS Press
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fandeli, Chafid. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty Offset
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gave Media
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Ed. III)*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nuryanti, Wiendu. 1993. *Concept, Perspective, and Challenges, Makalah Bagian dari Laporan Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Pitana, Gde I., dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : ANDI
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Rohman, Ainun dkk. 2009. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang: Averroes Press
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Sj. Sumarto, Hatifah. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius
- Soekadijo, R.G. 1997. *ANATOMI PARIWISATA*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka

- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subarsono. AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika A
- Sukardi, Nyoman. 1998. *Pengantar Pariwisata*. STP Nusa Dua-Bali
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata (Ed. II)*. Yogyakarta : ANDI
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisata (Ed. IV)*. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Yoeti, Oka A. 2008. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Kepariwisata*. Bandung : Angkasa Yanti
- Yoeti, Oka A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita

Perundang-undangan:

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011-2031

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 556 / 407 tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati,